

Dampak Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Bea Daerah Kota Langsa Tahun 2015-2019

Fitry Oetary

¹Program Studi Akuntansi, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email : fitry.oetary98@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah pada Kota Langsa. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Jenis data yang dianalisis dalam penulisan ini adalah data sekunder dengan metode sensus yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD Kota Langsa yang diperoleh dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Langsa. Dari Laporan Realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum tahun 2015 sampai 2019. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode statistik deskriptif dengan dibantu software SPSS 22.0. Dalam penelitian ini variabel-variabel penelitian diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu : variabel bebas (independent variable) dan variabel terikat (dependent variable). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum. Sedangkan variabel terikatnya adalah Belanja Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap belanja daerah pada Kota Langsa. (2) Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap belanja daerah pada Kota Langsa. (3) Pendapatan Asli Daerah dan Dana Aloksi Umum tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kota Langsa.

Kata Kunci : *Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Daerah.*

1. PENDAHULUAN

Daerah di Indonesia sekarang ini sedang melewati pertumbuhan yang cukup cepat, seiring dengan perkembangan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Di setiap daerah memiliki wilayah otoritasnya masing-masing yang diatur oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Peran otonomi daerah antara lain untuk pemberdayaan dan pengoptimalkan potensi setiap daerah. Dengan begitu tercapai tujuan dari otonomi daerah itu sendiri yaitu mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat (Saputri, Marissa Ayu & Muid, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah adalah wewenang Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dikaitkan dengan dua nilai dasar tersebut diatas, penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonomi dan penyerahan/pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian kekuasaan dan kewenangan tersebut (Mirani, Tumiwa, A.M.Koleangan, Rosalina, O. Niode, 2016).

Belanja Daerah menurut Jati (2020) adalah kewajiban pemerintah mengurangi nilai kekayaan bersih. Belanja atau pengeluaran merupakan pengeluaran kas daerah yang dilakukan secara teratur oleh pemerintah daerah guna membiayai kegiatan operasi dalam pemerintahan dan selanjutnya akan dilaporkan dalam APBD. Meningkatnya pengeluaran belanja daerah harus seimbang dengan dana yang diperoleh supaya dapat memenuhi keperluan yang dibutuhkan. Apabila kebutuhan tersebut telah terpenuhi, diharapkan kesejahteraan masyarakat pada setiap daerah menjadi meningkat dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat lebih maksimal. Kaitannya dengan kegiatan belanja pemerintah daerah tersebut, terdapat dua sumber utama yang dapat membiayai yaitu Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah.

Dana alokasi umum menurut Jati (2020) adalah dana yang berasal dari APBN yang kemudian dialokasikan kepada setiap daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan dalam memenuhi kebutuhan agar dapat mewujudkan pelaksanaan desentralisasi dan penulis menyatakan bahwa kemampuan daerah dalam menghasilkan sumber daya yang tinggi akan menyebabkan daerah tersebut memiliki kebebasan dalam menggunakan PAD sesuai dengan aspirasi, kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Menurut Jati (2020) dua sumber pendapatan tersebut memiliki jumlah cukup besar, sehingga dari kedua sumber utama tersebut memiliki peran penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri dapat diketahui bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah diberi batasan-batasan yang harus dilakukan, siapa yang harus melakukan dan ditujukan kepada siapa sehingga diharapkan dengan memahami aturan ini para pelaksana pengawasan keuangan daerah terutama tidak keluar dari aturan yang sudah ditetapkan. Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 4 menyatakan bahwa "pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan." Artinya dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan, bukan berdasarkan pada "pesanan proyek tertentu" dalam merencanakan anggaran. (Elizar Sinambela & Eka Nurmala Sari, 2018)

Pendapatan asli daerah (PAD) dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur kemampuan suatu daerah. Semakin besar kontribusi yang diberikan PAD terhadap APBD akan menunjukkan semakin besar kemampuan daerah dalam mengelola pembangunan di daerahnya sendiri dan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap

pemerintah pusat. Kemampuan perolehan PAD mencerminkan kemampuan daerah tersebut dalam pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerahnya, juga menunjukkan kemandirian keuangan daerahnya semakin baik. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan maka daerah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas.

Dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Peranan Dana Alokasi Umum terletak pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004).

Provinsi Aceh merupakan salah satu Provinsi yang ada di Indonesia yang berada di Wilayah Barat Indonesia. Aceh merupakan salah satu Provinsi yang mendapatkan status otonomi khusus yang dikarenakan sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi Aceh yang membawahi beberapa kabupaten kota di Aceh memiliki kebijakan yang telah diatur dalam Undang-Undang maupun peraturan daerah yang menangani terkait kebijakan di daerah. Kota Langsa merupakan salah satu kota yang berada di Wilayah Provinsi Aceh.

Kota Langsa adalah kota yang menerapkan hukum Syariat Islam. Kota Langsa terkenal sebagai kota pendidikan, kota perdagangan, kota kuliner dan kota wisata. Pada awalnya Kota Langsa berstatus Kota Administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif Langsa. Kota Administratif Langsa diangkat statusnya menjadi Kota Langsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tanggal 21 Juni 2001. Hari jadi Kota Langsa ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2001.

Disamping potensi laut, Kota Langsa juga memiliki potensi di bidang pertanian dan perkebunan, sehingga secara Pendapatan Asli Daerah untuk menopang APBD di wilayah ini perlu ditingkatkan lagi, namun demikian, perlu adanya perhatian khusus terkait dengan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum untuk melanjutkan kesinambungan.

Berikut data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintahan Kota Langsa tahun 2015-2019. Jika dilihat dari data Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2015 hingga 2019 tidak habis digunakan, dimana lebih tingginya anggaran daripada realisasi yang dipergunakan. Dilihat dari data Dana Alokasi Umum pada tahun 2015 hingga 2019 selalu memenuhi anggaran yang telah ditetapkan. Dapat diartikan bahwa di Kota Langsa memiliki kemampuan pemerataan keuangan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Pada data Belanja Daerah pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2019 tidak habis digunakan, dimana lebih besar anggaran daripada realisasi yang dipergunakan. Sedangkan pada tahun 2018 menunjukkan bahwa anggaran belum terpenuhi, dimana lebih tingginya realisasi daripada anggaran yang telah dianggarkan sebelumnya. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa kurang efektif.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Jolianis (2014) mengenai Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat menghasilkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Apriliawati, Kiki Ninda & Handayani (2016) mengenai Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. Hasilnya menunjukkan PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Hal ini berarti semakin tinggi PAD yang dihasilkan maka semakin meningkat pula belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dan semakin tinggi DAU yang diperoleh dari pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur maka semakin meningkat pula belanja daerah yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Dan telah terjadi *flypaper effect* pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Berarti Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur masih

sangat bergantung pada pemerintah pusat dalam membiayai belanja daerahnya hal ini dibuktikan dengan penggunaan Dana Alokasi Umum yang lebih dominan daripada Pendapatan Asli Daerah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yaitu jenis yang memusatkan perhatian pada perhitungan nilai yang ditunjukkan dengan nilai berupa angka dari suatu hasil penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat meneliti lebih dalam mengenai Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kota Langsa.

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang digunakan yaitu Variabel Independent (X) dan Variabel Dependent (Y). Objek penelitian dalam penelitian kali ini yaitu pada Pemerintahan Kota Langsa, pada tahun 2015 sampai 2019. Penelitian ini dilakukan pada Mei 2020.

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Kota Langsa. Penelitian ini dilakukan pada 5 tahun terakhir yaitu tahun 2015 sampai 2019, berdasarkan ketersediaan data yang diberikan pihak BPKD. Dalam penelitian ini, sampelnya adalah populasi tersebut, jadi populasi ini merupakan sampel penelitian. Data yang dianalisis dalam penulisan ini adalah data sekunder dengan metode sensus yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD Kota Langsa yang diperoleh dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Langsa. Dari Laporan Realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum tahun 2015 sampai 2019.

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dan teknik analisis data yang digunakan sudah jelas yaitu untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Maka teknik analisis data menggunakan metode statistik deskriptif dengan dibantu software SPSS 22.0, berikut adalah teknik analisis data yang akan dilakukan peneliti yaitu Uji Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik dan Uji Hipotesis.

3. HASIL PENELITIAN

1. Uji Statistik Deskriptif

Tabel.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

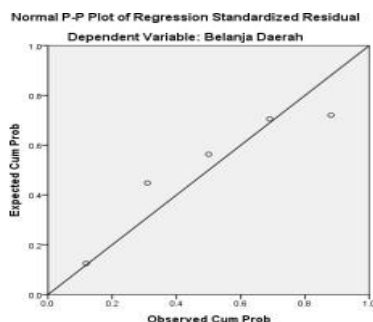
Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	5	114529994341.00	153718784258.00	130925828456.8000	14452703207.06609
DAU	5	425446753000.00	456700561000.00	444424882800.0000	11914886410.71566
Belanja Daerah	5	685403982427.00	1109385445250.31	943184472988.5680	169342115478.31403
Valid N (listwise)	5				

Sumber: Data diolah SPSS Versi 22.0

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa uji statistik deskriptif nilai belanja daerah minimum atau rendah sebesar Rp 685.403.982.427,00 yang terjadi pada tahun 2018. Sedangkan belanja daerah maksimum atau terendah mencapai Rp1.109.385.445.250,31 yang terjadi pada tahun 2016. Sedangkan rata-rata belanja daerah senilai Rp 943.184.472.988,5680 dengan standar deviasi sebesar Rp 169.342.115.478,31403.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas



Sumber: Data diolah SPSS Versi 22.0

Gambar.1 Hasil Uji Normalitas

Pada grafik normal p-plot terlihat pada gambar diatas bahwa pola grafik normal terlihat dari titik-titik yang menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolonieritas

Tabel. 2 Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PAD	,207	4,832
	DAU	,207	4,832

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber: Data diolah SPSS Versi 22.0

Dari tabel dapat dilihat bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki tolerance sebesar 0,207 > 0,10 dan nilai VIF sebesar 4,832 < 10. Variabel Dana Alokasi Umum memiliki nilai tolerance sebesar 0,207 > 0,10 dan nilai VIF sebesar 4,832 < 10. Dari masing-masing variabel memiliki nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolonieritas dalam penelitian ini.

c. Uji Autokorelasi

Tabel.3 Hasil Uji Autokoterasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.414 ^a	.172	-.656	217944592023 .66140	2.041

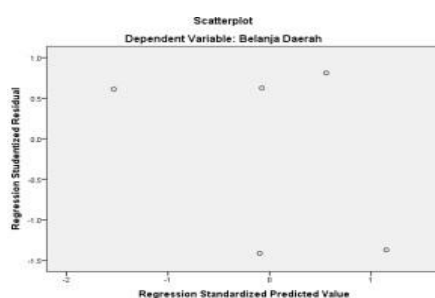
a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber Data diolah SPSS 22.0

Nilai DW sebesar 2,041 nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel menggunakan signifikansi 5%, jumlah sampel 5 (n) dan jumlah variabel independent 2 (k=2). Nilai DW 2,041 lebih besar dari batas atas (du) 1.71 dan kurang dari 2,28 (4-du), maka dapat disimpulkan bahwa tidak bisa menolak H0 yang menyatakan tidak ada autokolerasi positif atau negatif (sesuai tabel keputusan) atau dapat disimpulkan tidak ada autokolerasi.

d. Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data diolah SPSS Versi 22.0
Gambar.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar.2 diatas, dapat diketahui bahwa data (titik-titik) menyebar secara merata diatas dan dibawah garis nol, tidak berkumpul di satu tempat, serta membentuk datu pola tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa ada uji regresi ini tidak terjadi heterokedastisitas.

3. Pengujian Hipotesis

a. Uji t (Uji Parsial)

Tabel.4 Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1350536240636.217	7072177332055.831		-.191	,866
	PAD	,902	16.574	,077	,054	,962
	DAU	4.895	20.104	,344	,243	,830

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

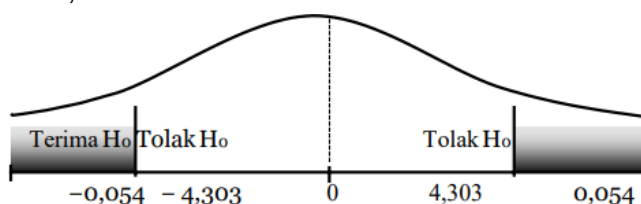
Sumber : Data diolah SPSS versi 22.0

Hasil pengujian statistic t pada tabel dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara individual (parsial) mempunyai hubungan signifikan atau tidak terhadap belanja daerah. Untuk

kriteria uji t dilakukan pada tingkat $\alpha = 0,05$ dengan nilai t untuk $n = 5-2 = 3$ adalah. $t_{hitung} = 0,54$ dan $t_{tabel} = 4,303$.



Gambar.3 Kriteria Pengujian Uji t

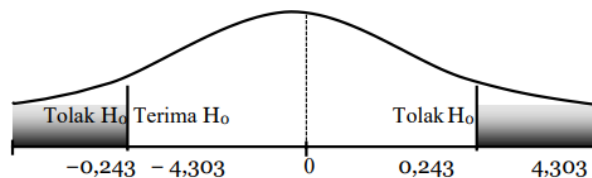
H_0 diterima jika $-4,303 \leq t_{hitung} \leq 4,303$ pada $\alpha = 5\%$

H_0 ditolak jika $t_{hitung} > 4,303$, atau $-t_{hitung} < -4,303$

Nilai t_{hitung} untuk variabel Dana alokasi umum adalah 0,054 dan t_{tabel} dengan $\alpha = 5\%$ diketahui sebesar 4,303. Dengan demikian $-t_{hitung}$ lebih kecil dari $-t_{tabel}$ dan nilai signifikan pendapatan asli daerah sebesar $0.964 < 0.05$ artinya dari hasil tersebut didapat kesimpulan bahwa H_1 ditolak (H_0 diterima) menunjukkan bahwa tidak pengaruh antara pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah pada Kota Langsa.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dana alokasi umum berpengaruh secara individual (parsial) mempunyai hubungan signifikan atau tidak terhadap belanja daerah. Untuk kriteria uji t dilakukan pada tingkat $\alpha = 0,05$ dengan nilai t untuk $n = 5-2 = 3$ adalah 4,303. $t_{hitung} = 0,243$ dan $t_{tabel} = 4,303$



Gambar.4 Kriteria Pengujian Uji t

H_0 diterima jika $-0,243 \leq t_{hitung} \leq 0,243$ pada $\alpha = 5\%$

H_0 ditolak jika $t_{hitung} > 4,303$, atau $-t_{hitung} < -4,303$

Nilai t_{hitung} untuk variabel Dana alokasi umum adalah 4,303 dan t_{tabel} dengan $\alpha = 5\%$ diketahui sebesar 0,243. dengan demikian $-t_{hitung}$ lebih kecil dari $-t_{tabel}$ dan nilai signifikan dana alokasi umum sebesar 0,830 $> 0,05$ artinya dari hasil tersebut didapat kesimpulan bahwa H_0 ditolak (H_a diterima) menunjukkan bahwa pengaruh dan tidak signifikan antara dana alokasi umum terhadap belanja daerah pada Kota Langsa.

b. Uji F (Uji Signifikan Simultan)

Tabel.5 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1970731791396214800	2	98536589569810740000	.207	.828 ^b
		0000.000		00.000		
	Residual	9499969038472042000	2	47499845192360210000		
		0000.000		000.000		
	Total	1147070082986825700	4			
		00000.000				

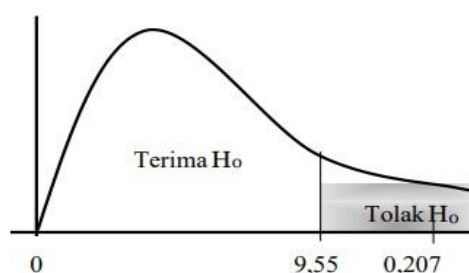
a. Dependent Variable: Belanja Daerah
 b. Predictors: (Constant), DAU, PAD

Sumber: SPSS versi 22.0

$t_{tabel} = 5 - 2 - 1 = 3$

$f_{hitung} = 0,207$ dan $f_{tabel} = 9,55$

kriteria pengambilan keputusan :



Gambar.5 Kurva Uji F

H_0 diterima jika $-9,55 \leq f_{hitung} \leq 9,55$, untuk $\alpha = 5\%$

H_0 ditolak jika $f_{hitung} > 9,55$, atau $-f_{hitung} < -9,55$ untuk $\alpha = 5\%$

Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa nilai f_{hitung} sebesar 0,207 dengan tingkat signifikan sebesar 0,828. Sedangkan nilai f_{tabel} diketahui sebesar 9,55. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa $f_{hitung} < f_{tabel}$ ($0,207 < 9,55$) artinya H_0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja daerah pada Kota Langsa.

c. Uji Koefisien Determinasi (R-square)

Tabel.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.414 ^a	.172	-.656	217944592023.66140
a. Predictors: (Constant), DAU, PAD				
b. Dependent Variable: Belanja Daerah				

Sumber: SPSS Versi 22.00

$$D = R^2 \times 100\%$$

$$D = 0.656 \times 100\%$$

$$= 65,6\%$$

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai dari R square sebesar 0.656 yang berarti 65,6% dan hal ini menyatakan bahwa variabel dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah sebesar 65,6% untuk mempengaruhi variable belanja daerah. Selanjutnya selisih $100\% - 65,6\% = 34,4\%$. hal ini menunjukkan 34,4% tersebut adalah variabel lain yang tidak berkontribusi terhadap penelitian belanja daerah.

4. PEMBAHASAN

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan penelitian yang diperoleh mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah pada Kota Langsa, hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan nilai thitung untuk variabel Pendapatan Asli Daerah adalah 0,056 dan ttabel dengan $\alpha = 5\%$ diketahui sebesar 4,303. Dengan demikian $-thitung$ lebih kecil dari $-ttabel$ dan nilai signifikan Pendapatan Asli Daerah sebesar $0,962 > 0,05$ artinya dari hasil tersebut H_0 ditolak menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Kota Langsa.

Secara teoritis seharusnya PAD memiliki pengaruh yang besar terhadap Belanja Daerah karena dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapata asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber di luar pendapatan asli daerah karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat.

PAD merupakan sumber pembiayaan untuk anggaran belanja daerah. PAD didapatkan dari iuran langsung dari masyarakat, seperti pajak, retribusi, dan lain sebagainya. Tanggung jawab agen (pemerintah daerah) kepada prinsipal (masyarakat) adalah memberikan pelayanan public (public service) yang baik kepada masyarakat melalui anggaran belanja daerah, karena masyarakat telah memberikan sebageian uangnya kepada pemerintah daerah.

Pertumbuhan belanja daerah merupakan salah satu usaha pemerintahkabupaten/kota untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di daerah masing-masing.Pertumbuhan belanja daerah merupakan ciri positif bahwa pemerintahankabupaten/Kota telah berusaha mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Dari hasil pengujian tersebut, maka pemerintah daerah di Kota Langsa masih perlu untuk menggali potensi daerah dalam meningkatkan pertambahan pendapatan di daerah. Dalam era otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternative sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (sharing) dari pemerintah pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Friyani, 2017), (Rusmita, 2016), (Marzalita et al., 2014) dan (Sorongan, 2013) menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan penelitian yang diperoleh mengenai pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap belanja daerah pada Kota Langsa hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan nilai t_{hitung} untuk variabel Dana Alokasi Umum adalah 0,243 dan t_{tabel} dengan $\alpha = 5\%$ diketahui sebesar 4,303. Dengan demikian $-t_{hitung}$ lebih kecil dari $-t_{tabel}$ dan nilai signifikan Dana Alokasi Umum sebesar $0,830 < 0,05$ artinya dari hasil tersebut didapat kesimpulan bahwa H_0 ditolak menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Kota Langsa.

Ketika Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami peningkatan, Belanja Daerah juga mengalami peningkatan. Tetapi besarnya peningkatan Dana Alokasi Umum tidak sebanding dengan peningkatan Belanja Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah, tetapi pengaruh tersebut tidak signifikan.

Menurut PP No 55 Tahun 2005 Pasal 1 No 22 dan 23, tujuan dibentuknya Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka Desentralisasi. Contoh nyata Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan untuk membiayai biaya yang bersifat umum, penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak hanya ditransfer untuk daerah tetapi juga digunakan untuk pos belanja pegawai dan untuk pembangunan infrastruktur.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Firdayanti & Hidayat, 2019), (Rusmita, 2016), (Nur, 2015) dan (Sorongan, 2013) menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan penelitian yang diperoleh mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah pada Kota Langsa hasil uji hipotesis secara simultan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 0,207 dengan tingkat signifikan sebesar 0,828. Sedangkan nilai F_{tabel} diketahui sebesar 9,55. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa $F_{hitung} < F_{tabel}$ ($0,207 < 9,55$) artinya H_0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kota Langsa.

Hal ini menunjukkan pemerintah Kota Langsa masih tergantung oleh DAU dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Ini bertujuan untuk menutup kesenjangan fiskal dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat. DAU merupakan sumber penerimaan daerah yang paling besar. Sedangkan PAD didapatkan dari iuran langsung masyarakat, seperti pajak, retribusi dan lain sebagainya. Sehingga pemerintah Kota Langsa masih perlu untuk menggali potensi daerah dalam meningkatkan pertambahan pendapatan di daerah.

Menurut Kepmendagri Nomor. 29 Tahun 2002, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Dalam undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa belanja daerah dilaksanakan untuk mendanai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, sedangkan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat didanai dari atas beban APBN.

Menurut UU No 17 Tahun 2003 bahwa pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan Daerah (basis kas) adalah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lain yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Penerimaan tersebut menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan Daerah (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.

Menurut PP No 104 Tahun 2000 pasal 15 Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Dana Alokasi Umum merupakan bantuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui transfer untuk membantu keuangan daerah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di kemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah pada Kota Langsa adalah sebagai berikut:

1. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap belanja daerah pada Kota Langsa
2. Secara parsial Dana Aloksi Umum tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap belanja daerah pada Kabupaten Simeulue
3. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Aloksi Umum tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kota Langsa.

6. REFERENSI

- Abdullah, I., & Nainggolan, E. P. (2019). Kualitas Laporan Keuangan Daerah Ditinjau Dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Tata Kelola Aset Daerah (Study Pada Kantor Badan Tata kelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 19(1), 118-126.
- Ardila, I., & Fadhila, N. F. N. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Profitabilitas dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderating. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Ardila, I., & Christiana, I. (2020). Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Sektor Kuliner Di Kecamatan Medan Denai. *LIABILITIES (JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI)*, 3(3), 158-167.
- Elizar Sinambela, F. S., & Eka Nurmala Sari. (2018). Analisis Struktur Apbd Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 1–9.
- Ikhsan, A., Muhyarsyah., Tanjung, H., & Oktaviani, A. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Ciptapustaka Media.
- Hani, S. (2021). [MODUL] PETUNJUK DAN TATA CARPELAKSANAAN PAJAK RESTORAN. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Hani, S. (2021). [Prosiding] THE PERCEPTION OF THE CONCEPT OF SHARIA FINANCIAL STATEMENTS ON MUSLIM SMALL MEDIUM ENTERPRISES (SMES) ENTREPRENEURS IN MEDAN CITY. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Harahap, S. H., & Nurjannah, N. (2020). Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Plastik Dan Kemasan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20(2), 234-246.
- Harahap, S. H., & ALPI, M. F. (2018). PEMANFAATAN INTERNET SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN DIDALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI MENGAJAR DOSEN PADA PERGURUAN TINGGI DI KOTA MEDAN. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Irsandy Octovido, Nengah Sudjana, D. F. A. (2014). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Tahun 2009 -2013. *Jurnal Administrasi Bisnis (Jab)*, 15(1), 1–7.
- LUFRIANSYAH, L., & SIREGAR, S. A. (2018). DUE PROFESSIONAL CARE SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, DAN MOTIVASI AUDITOR

- TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP). Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen, 1(1).
- Nainggolan, E. P., & Abdullah, I. (2019). Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Bank Milik Pemerintah tahun 2015–2018. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 19(2), 151-158.
- Ritonga, P. (2020). PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP PENDANAAN EKSTERNAL PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. *JAKK| Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer*, 3(1), 1-9.
- Ritonga, P., & Hafsah, H. (2018). PENGEMBANGAN DAN MODEL PEMBELAJARAN MATA KULIAHPENGANTAR AKUNTANSI BERBASIS KKNi DAN PEMANFAATAN KONTEN DOKUMEN. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Sinambela, Elizar & Rizki Ana Pohan, K. (2016). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Rovinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 16(1), 1–18.
- Zurriah, R. (2021). Pengaruh Free Cash Flow Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 21(1), 101-106.